

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 PARIWISATA DAN EKOWISATA**

#### **2.1.1 Pariwisata**

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain (Damanik dan Weber, 2006). Menurut Mathieson dan Wall (1982) Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan sementara seseorang ke tempat lain dari tempat tinggal dan tempat kerjanya serta melakukan berbagai kegiatan selama berada ditempat tujuan dan memperoleh kemudahan dalam penyediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata (Yulianda, 2007).

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan beberapa istilah yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata antara lain :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang tersebut.
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
6. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Menurut Munasef (1995) dalam Sulaksmi (2007), kegiatan pariwisata terdiri dari tiga unsur, diantaranya :

1. Manusia (*man*) yang merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan maksud menikmati keindahan dari suatu tempat (alam).
2. Ruang (*space*) yang merupakan daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan.
3. Waktu (*time*) yang merupakan waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Kelly (1996) dalam Sulaksmi (2007) menyatakan klasifikasi bentuk wisata yang dikembangkan berdasarkan pada bentuk utama atraksi atau daya tariknya yang kemudian ditekankan pada pemasarannya. Bentuk wisata tersebut antara lain : ekowisata (*ecotourism*), wisata alam (*nature tourism*), wisata petualangan (*adventure tourism*), wisata berdasarkan waktu (*gateway and stay*) dan wisata budaya (*cultural tourism*). Menurut Gunn (1994), bentuk – bentuk wisata dikembangkan dan direncanakan berdasarkan hal – hal berikut :

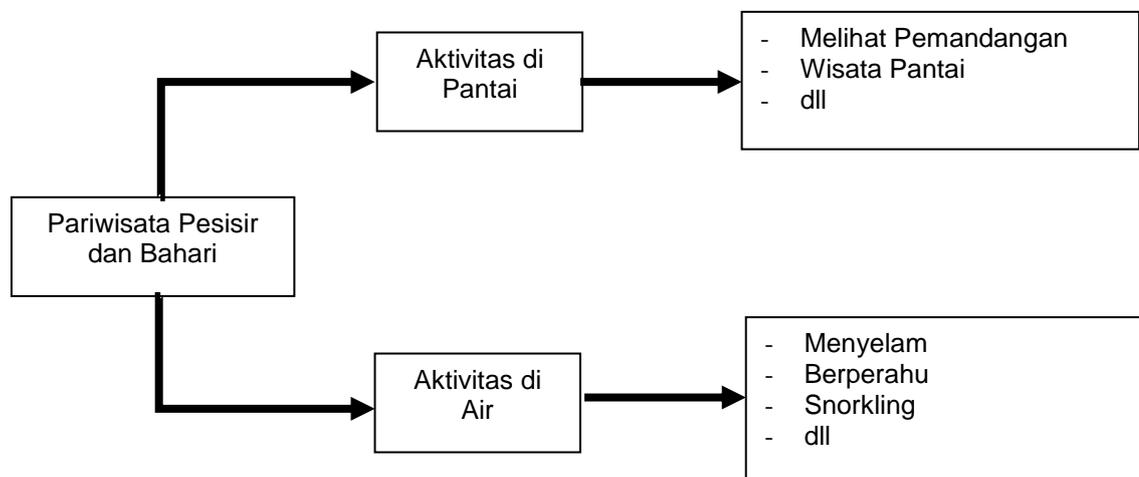
1. Kepemilikan (*ownership*) atau pengelolaan areal wisata tersebut yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor yaitu sektor pemerintahan, sektor organisasi nir laba, dan perusahaan konvensional.
2. Sumberdaya (*resource*), yaitu alam (*natural*) atau budaya (*cultural*).
3. Perjalanan wisata/lama tinggal (*touring/length of stay*).
4. Tempat kegiatan yaitu di dalam ruangan (*indoor*) atau di luar ruangan (*outdoor*).
5. Wisatawan utama atau wisatawan penunjang (*primary/secondary*).
6. Daya dukung (*carrying capacity*) tampak dengan tingkat penggunaan pengunjung yaitu intensif, semi intensif dan ekstensif.

Dalam kegiatan pariwisata aspek lingkungan merupakan bagian yang harus diperhatikan (Dahuri, 2003a). Strategi pariwisata yang berhasil adalah terpenuhinya manfaat maksimal ketika preservasi lingkungan terlaksana dengan dengan baik. Manfaat maksimal dari kegiatan pariwisata tersebut diindikasikan oleh

adanya sejumlah kunjungan turis atau wisatawan baik dari luar maupun dalam negeri dari objek wisata yang dimaksud.

Menurut Dahuri *et al.* (2004), pariwisata pesisir adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di sekitar pantai seperti : berenang, berselancar, berjemur, berdayung, menyelam, *snorkling*, *beachombing/reef walking*, berjalan – jalan atau berlari sepanjang pantai, menikmati keindahan suasana pesisir dan bermeditasi. Dahuri (2003b) menyatakan bahwa pariwisata pesisir diasosiasikan dengan “3S” (*sun*, *sea* dan *sand*) yaitu jenis pariwisata yang menyediakan keindahan dan kenyamanan alami dari kombinasi cahaya matahari, laut dan pantai berpasir bersih.

Hall (2001) menyatakan bahwa konsep pariwisata pesisir (*coastal tourism*) adalah hal – hal yang terkait dengan kegiatan wisata, hal – hal yang menyenangkan dan aktivitas rekreasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan perairannya. Sementara itu, Orams (1999) mendefinisikan pariwisata bahari (*marine tourism*) sebagai aktivitas rekreasi yang meliputi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan fokus pada lingkungan pesisir.



Gambar 2-1 Kerangka Pariwisata pesisir dan bahari (Hall, 2001)

Pariwisata pantai merupakan bagian dari wisata pesisir yang memanfaatkan pantai sebagai objek dan daya tarik pariwisata yang dikemas dalam paket wisata. Pariwisata pantai meliputi semua kegiatan wisata yang berlangsung di daerah pantai seperti menikmati keindahan alam pantai, olahraga

pantai, *sun bathing*, piknik, berkemah dan berenang di pantai. Pada perkembangannya, jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan di pantai sangat beragam tergantung pada potensi dan arah pengembangan wisata di suatu kawasan pantai tertentu.

### **2.1.2 Ekowisata**

Ekowisata pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 oleh organisasi *The Ecotourism Society*, sebagai perjalanan ke daerah – daerah yang masih alami yang dapat mengkonservasi lingkungan dan memelihara kesejahteraan masyarakat setempat (Blangy dan Wood, 1993 *dalam* Linberg dan Hawkins, 1993). Ekowisata merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya alam dan industri kepariwisataan (META, 2002). Kegiatan ekowisata dapat menciptakan dan memuaskan keinginan akan alam, tentang eksploitasi potensi wisata untuk konservasi dan pembangunan serta mencegah dampak negatif terhadap ekosistem, kebudayaan, dan keindahan (Lindberg dan Hawkins, 1993). Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, disamping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Ekowisata berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke daerah alami yang menciptakan kegiatan bisnis (Pudjiwaskito, 2005). Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata (Fandeli, 2000).

Sumberdaya ekowisata terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dapat diintegrasikan menjadi komponen terpadu bagi pemanfaatan wisata. Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu (Fandeli, 2000; META, 2002; dan Yulianda, 2007) :

- a. Wisata alam (*nature tourism*), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya.
- b. Wisata budaya (*cultural tourism*), merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan.
- c. Ekowisata (*Ecotourism, green tourism* atau *alternative tourism*), merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani

kepentingan perlindungan sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan.

Dalam kaitannya dengan ekowisata, Damanik dan Weber (2006) menyusun tiga konsep dasar tentang ekowisata yaitu sebagai berikut : *Pertama*, perjalanan *outdoor* dan di kawasan alam yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. *Kedua*, wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas yang diciptakan dan dikelola oleh masyarakat kawasan wisata. *Ketiga*, perjalanan wisata ini menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal. Dari definisi tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa prinsip ekowisata menurut Fandeli (2000), yaitu sebagai berikut

- a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
- b. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
- c. Menawarkan pengalaman – pengalaman positif bagi wisatawan maupun penduduk lokal.
- d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi.
- e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai – nilai lokal.
- f. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik di daerah tujuan wisata.
- g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk pada aturan main yang adil dandisepakati bersama dalam transaksi – transaksi wisata.

Kegiatan wisata yang dapat dikembangkan dengan konsep ekowisata bahari dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu wisata pantai dan wisata bahari. Menurut Yulianda (2007), wisata pantai merupakan kegiatan wisata yang

mengutamakan sumberdaya pantai dan budaya masyarakat pantai seperti rekreasi, olahraga dan menikmati pemandangan, sedangkan wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan sumberdaya bawah laut dan dinamika air laut.

### **2.1.3 Pariwisata Berkelanjutan**

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut *The World Conservation Union* (WCU) adalah proses pembangunan suatu tempat atau daerah tanpa mengurangi nilai guna dari sumber daya yang ada. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan pengawasan dan pemeliharaan terhadap sumber-sumber daya yang sekarang ada, agar dapat dinikmati untuk masa yang akan datang. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan bertahan lama menghubungkan wisatawan sebagai penyokong dana terhadap fasilitas pariwisata dengan pemeliharaan lingkungan.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan mengintegrasikan antara keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang seimbang tanpa membahayakan kondisi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses untuk pencapaian pengembangan tanpa adanya degradasi dan penipisan/depleksi sumber daya. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya di masa yang mendatang (UNEP/PAP, 1997).

Konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada empat prinsip dasar (Angelevska-Najdeska & Rakicevik 2012), yaitu:

- Prinsip Pelestarian lingkungan, dimana dalam pengembangan agar disesuaikan dengan pemeliharaan ekologi, sumber daya keanekaragaman hayati dan biologi.
- Prinsip keberlanjutan sosial, merupakan pengembangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai tradisional dan penguatan identitas dari masyarakat.
- Prinsip keberlanjutan budaya, menyediakan pengembangan budaya yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya komunitas masyarakat.
- Prinsip keberlanjutan, pengembangan ekonomi dengan menggunakan biaya dan sumber daya yang efektif untuk dikelola dengan tujuan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

Menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED, 1987), konsep pariwisata berkelanjutan adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan (hidup) generasi yang akan datang.

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) merupakan suatu bentuk dari berbagai alternatif wisata yang didasarkan pada:

- Meminimasi dampak dari kegiatan wisata terhadap lingkungan dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan ekologis dan berkontribusi dalam upaya mempertahankan kondisi lingkungan.
- Meminimasi dampak negatif aktivitas pariwisata terhadap komunitas lokal untuk mencapai keberlanjutan sosial.
- Meminimasi dampak negatif aktivitas pariwisata terhadap adat istiadat, budaya maupun tradisi komunitas lokal (*local wisdom*) untuk mencapai keberlanjutan budaya.
- Optimasi nilai/manfaat ekonomi dari komunitas lokal sebagai akibat dari pengembangan wisata sehingga mencapai keberlanjutan ekonomi.
- Education, Preparation and Information. Upaya memberikan pendidikan tentang lingkungan kepada para pengunjung, penduduk setempat, pemerintah daerah, pedesaan dan penduduk perkotaan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada daerah wisata.
- *Local control*, pelibatan masyarakat lokal didalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Dumbraveanu 2004).

Pariwisata berkelanjutan dapat ditinjau dari tiga perspektif (McCool & Moisey 2001), yaitu:

1. Mempertahankan industri pariwisata dalam jangka waktu yang lama;
2. Pariwisata yang lebih peduli pada usaha skala kecil, peka terhadap budaya lokal dan dampak lingkungan dan adanya keterlibatan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan kebijakan;
3. Pariwisata sebagai alat pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurut (Sumariadhi, 2006) terdapat tiga kriteria ideal dalam pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu apabila:

1. Menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*)  
Pembangunan pariwisata harus memberikan keuntungan bagi masyarakat. Bentuk keuntungan dapat dilihat dari peningkatan GNP, daya beli, lapangan pekerjaan dan biaya-biaya lingkungan yang harus dibayar atas pembangunan tersebut.
2. Adanya penerimaan sosial dan budaya (*socially and culturally acceptable*)  
Pembangunan pariwisata harus diterima secara sosial budaya oleh komponen yang terlibat dalam pembangunan (pemerintah, industri, masyarakat lokal dan wisatawan)
3. Berkelanjutan secara ekologis (*ecologically sustainable*)  
Pembangunan pariwisata tidak menghabiskan ketersediaan sumber daya yang ada untuk kebutuhan generasi mendatang. Selain itu perlu dilakukan penanggulangan dampak-dampak negatif akibat pembangunan.

Menurut *United Nation World Tourism Organization* dalam McKercher (2003) ada 4 (empat) prinsip dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu:

1. Keberlanjutan secara ekonomi, pemenuhan manfaat ekonomi untuk kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang;
2. Keberlanjutan secara ekologi, pembangunan yang mendukung keberadaan keragaman hayati, pemenuhan akan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari.
3. Keberlanjutan budaya, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab penuh terhadap hidupnya dengan melalui penguatan identitas lokal;
4. Keberlanjutan masyarakat lokal, penguatan terhadap keberadaan masyarakat lokal dengan keterlibatan secara aktif dalam usaha pengembangan pariwisata.

## 2.2 KAWASAN PESISIR DAN PANTAI

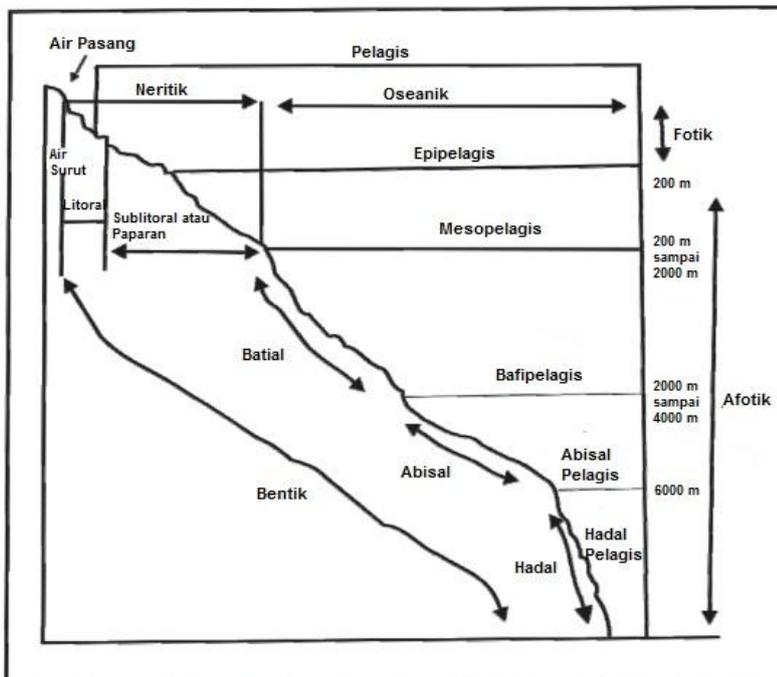
### 2.2.1 Kawasan Pesisir

Dahuri *et al.* (2004) mendefinisikan kawasan pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu : batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*). Menurut Soegiarto (1976) dalam Dahuri *et al.* (2004) definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat – sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses – proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Bengen (2001) menyatakan kawasan pesisir dari sudut ekologis sebagai lokasi dari beberapa ekosistem yang unik dan saling terkait, dinamis dan produktif. Ekosistem pesisir mempunyai kemampuan terbatas terhadap masukan limbah. Hal ini sangat tergantung pada volume dan jenis limbah yang masuk. Apabila limbah tersebut melampaui kemampuan asimilasi perairan pesisir, maka kerusakan ekosistem dalam bentuk pencemaran akan terjadi.

Dalam suatu kawasan pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan (*manmade*). Ekosistem alami yang terdapat di kawasan pesisir antara lain: terumbu karang (*coral reef*), hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir (*sandy beach*), formasi pes-caprae, formasi baringtonia, estuaria, laguna dan delta. Sementara itu, ekosistem buatan antara lain : tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, agroindustri dan kawasan pemukiman (Dahuri *et al.*, 2004). Sumberdaya di kawasan pesisir terdiri dari

sumberdaya alam yang dapat pulih dan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih. Sumberdaya yang dapat pulih antara lain meliputi sumberdaya perikanan (plankton, bentos, ikan, moluska, krustacea, mamalia laut); rumput laut; padang lamun; hutan mangrove; dan terumbu karang. Sumberdaya yang tidak dapat pulih dapat berupa minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit dan mineral serta bahan tambang lainnya. Pada kelompok sumberdaya yang dapat pulih, hidup dan berkembang berbagai macam biota laut, sehingga dengan keanekaragaman sumberdaya tersebut diperoleh potensi jasa – jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan wisata (Dahuri *et al.*, 2004).



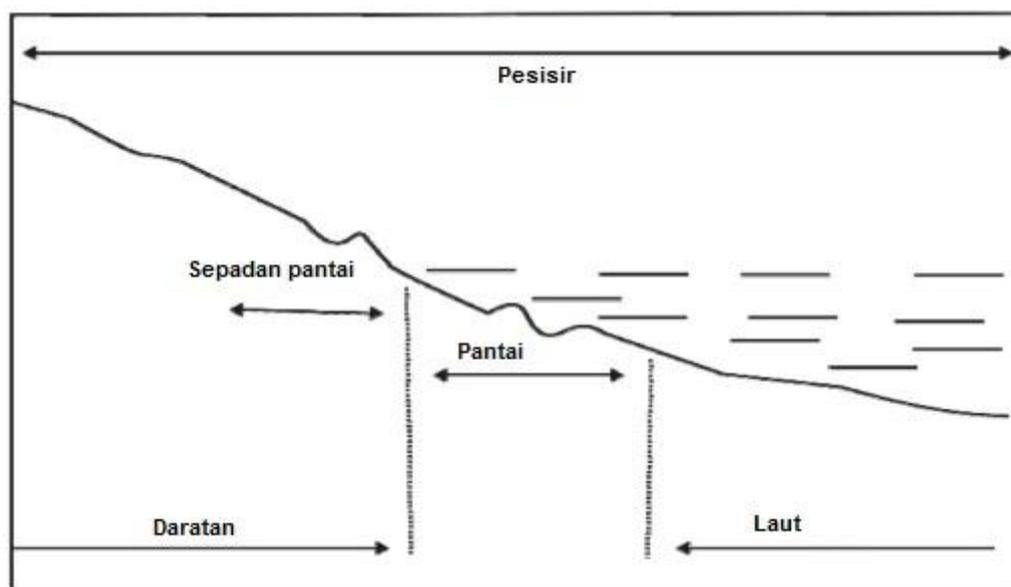
Gambar 2-2 Zonasi wilayah pesisir dan lautan secara horisontal dan vertikal (Nybakken, 1992)

Menurut Nybakken (1992), ekosistem laut dapat dilihat dari segi horizontal dan vertikal. Secara horizontal kawasan pelagik terbagi menjadi dua yaitu laut pesisir (zona neritik) yang mencakup daerah paparan benua dan laut lepas (lautan atau zona oseanik). Zonasi perairan laut dapat pula dilakukan atas dasar faktor – faktor fisik dan penyebaran komunitas biotanya. Seluruh daerah perairan terbuka disebut kawasan pelagik dan kawasan bentik adalah kawasan dibawah kawasan pelagik atau dasar laut. Organisme pelagik adalah organisme

yang hidup di laut terbuka dan lepas dari dasar laut. Zona dasar laut beserta organismenya disebut daerah dan organisme bentik. Secara vertikal wilayah laut dibagi berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk ke perairan. Zona fotik adalah bagian kolom perairan laut yang masih mendapat cahaya matahari, disebut juga zona epipelagis. Zona afotik berada dibawah zona fotik, yaitu daerah yang secara terus menerus berada dalam keadaan gelap dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Zonasi wilayah pesisir dan lautan secara horisontal dan vertikal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

### 2.2.2 Kawasan Pantai

Bagian kawasan pesisir yang paling produktif adalah wilayah muka pesisir atau pantai. Daerah pantai adalah suatu kawasan pesisir beserta perairannya dimana daerah tersebut masih terpengaruh baik oleh aktivitas darat maupun laut (Pratikto *et al.*, 1997). Garis pantai merupakan suatu garis batas pertemuan (kontak) antara daratan dengan air laut. Posisinya bersifat tidak tetap, dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Pantai terletak antara garis surut terendah dan air pasang tertinggi (Bengen, 2001). Batas daerah pantai dapat dilihat pada Gambar 2-2 berikut ini.



Gambar 2-3. Batas daerah pantai (Pratikto *et al.*, 1997)

Pratikto *et al.* (1997), menyatakan bahwa berdasar asal mula pembentukannya, pantai di Indonesia dikategorikan menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Pantai tenggelam (*sub-emergence*) : terbentuk oleh genangan air laut pada daratan yang tenggelam.
2. Pantai timbul (*emergence*) : terbentuk oleh genangan air laut pada daratan yang sebagian terangkat.
3. Pantai netral : pembentukannya tidak tergantung pada pengangkatan atau penurunan daratan, melainkan pengendapan aluvialnya. Pantai ini dicirikan dengan pantai pada ujung delta yang dalam dengan bentuk pantai sederhana atau melengkung.
4. Pantai campuran (*compound*): terbentuk oleh proses pengangkatan dan penurunan daratan, yang diindikasikan oleh adanya daratan pantai (*emergence*) dan teluk – teluk (*sub-emergence*).

Karakteristik bentuk pantai berbeda – beda antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Ada pantai yang berlumpur, berpasir yang datar dan landai, berbatu dan terjal. Keadaan topografi dan geologi wilayah pesisir mempengaruhi perbedaan bentuk pantai. Gambar pantai (pantai berpasir, berbatu dan berlumpur) secara visual dapat dilihat gambar dibawah ini.

### **1. Pantai berpasir**

Umumnya pantai berpasir terdapat di seluruh dunia dan lebih dikenal dari pada pantai berbatu. Hal ini disebabkan pantai berpasir merupakan tempat yang dipilih untuk melakukan berbagai aktivitas rekreasi (Nybakken, 1992). Pantai berpasir sebagian besar terdiri atas batu kuarsa dan *feldspar*, bagian yang paling banyak dan paling keras sisa – sisa pelapukan batu di gunung. Pantai yang berpasir dibatasi hanya di daerah dimana gerakan air yang kuat mengangkut partikel yang halus dan ringan. Total bahan organik dan organisme hidup di pantai yang berpasir jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jenis pantai lainnya (Dahuri *et al.*, 2004). Menurut Islami (2003) peruntukan pantai dengan substrat pasir hitam adalah *boating*, sedangkan pantai berpasir putih lebih bervariasi, seperti *boating*, selancar, renang, *snorkling* dan *diving*. Parameter utama bagi daerah pantai berpasir adalah pola arus yang akan mengangkut pasir yang

halus, gelombang yang akan melepaskan energinya di pantai dan angin yang juga merupakan pengangkut pasir (Dahuri *et al.*, 2004).

## **2. Pantai berbatu**

Pantai berbatu merupakan pantai dengan topografi yang berbatu – batu memanjang ke arah laut dan terbenam di air (Dahuri *et al.*, 2004). Pantai berbatu yang tersusun dari bahan yang keras merupakan daerah yang paling padat mikroorganismenya dan mempunyai keragaman terbesar baik untuk spesies hewan maupun tumbuhan. Keadaan ini berlawanan dengan pantai berpasir dan berlumpur yang hampir tandus (Nybakken, 1992). Pantai berbatu menjadi habitat berbagai jenis moluska, bintang laut, kepiting, anemon dan juga ganggang laut (Bengen, 2001).

## **3. Pantai berlumpur**

Pantai berlumpur memiliki substrat yang halus. Pantai berlumpur hanya terbatas pada daerah intertidal yang benar – benar terlindung dari aktivitas laut terbuka. Pantai berlumpur dapat berkembang dengan baik jika ada suatu sumber partikel sedimen yang butirannya halus. Pantai berlumpur terdapat di berbagai tempat, sebagian di teluk yang tertutup, gobah, pelabuhan dan terutama estuaria (Nybakken, 1992).

Karakteristik pantai berdasarkan kemiringannya sangat mempengaruhi aneka kegiatan/aktivitas wisata. Menurut Pangesti (2007) semakin landai suatu pantai maka semakin besar lebar pantai yang dapat dimanfaatkan untuk wisata. Pada daerah supratidal (daerah yang tidak tergenang) dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti berjemur, bermain pasir, berjalan. Sedangkan untuk daerah intertidal merupakan daerah antara pasang tertinggi dan surut terendah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat mandi dan berenang. Dan daerah Subtidal (daerah yang selalu tergenang air) dapat dimanfaatkan untuk area renang, wisata bahari dan olahraga air. Selanjutnya Yulianda (2007) mengemukakan bahwa tipe pantai menurut kemiringannya terbagi menjadi 4 tipe yaitu pantai datar dengan slop kemiringan  $< 10^\circ$ , landai  $10^\circ - 25^\circ$ , curam  $>25^\circ - 45^\circ$  dan terjal  $> 45^\circ$ .

### 2.3 KERENTANAN PANTAI

Perairan pantai memiliki potensi sumberdaya alam (hayati) yang sangat melimpah, apabila kegiatan pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk yang diperkirakan akan terus membengkak dimana diperkirakan pada tahun 2020 akan mendekati jumlah 257 juta jiwa dan lebih dari 60% akan tinggal di daerah pesisir, hal ini akan menyebabkan semakin beratnya beban bagi perairan pantai (Bachtiar, 2002).

Pantai sangat rentan terhadap berbagai tekanan yang berpengaruh secara langsung yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satunya dari berbagai aktivitas wisata. Pearce (1985) mengemukakan bahwa berbagai tekanan lingkungan yang terkait dengan pariwisata sehingga dapat dikelompokkan dalam empat jenis yaitu: 1) restrukturisasi lingkungan secara permanen yang mengintegrasikan berbagai fasilitas pariwisata; 2) generasi limbah dan transportasi; 3) aktivitas wisatawan; dan 4) efek dinamika populasi dan dampak dari pariwisata.

Kawasan pantai dapat terganggu keberadaannya apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut Situmorang (2001) daya dukung ekologis akan terlampaui apabila jumlah pengunjung dengan karakteristiknya mengganggu kehidupan satwa dan merusak ekosistem. Keindahan daya dukung juga akan dilampaui apabila pengunjung datang dengan jumlah yang banyak dan sisa kunjungannya tetap tersisa (jumlah satwa yg semakin sedikit, sampah, tulisan di pohon, erosi dan lain-lain).

### 2.4 KUALITAS PERAIRAN

Kualitas perairan pantai sangat dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas di sekitarnya. Bahan-bahan pencemar dari daratan masuk ke perairan arus pasang surut setiap harinya. Bahan-bahan ini akan terperangkap dan terakumulasi serta terabsorpsi di perairan pantai (Clark, 1977).

Terdapat dua kriteria kualitas air di dalam permasalahan pencemaran, yaitu kualitas air buangan yang disebut *waste water effluent*, yang dapat

diterapkan dengan suatu standarisasi, sehingga nantinya dikenal dengan istilah *effluent standar* (standar air buangan). Standar lainnya adalah standar dari air yang berada di dalam badan air itu sendiri dimana nantinya akan menerima air buangan, dikenal dengan istilah *stream standart* (Riyadi, 1984).

Penetapan standar sebagai batas mutu minimal yang harus dipenuhi telah ditentukan baik dengan standar internasional, standar nasional maupun standar perusahaan. Didalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 51/MEN.KLH/2004 tentang baku mutu air laut diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu baku mutu air laut untuk perairan pelabuhan, baku mutu air laut untuk wisata bahari dan baku mutu air laut untuk biota laut.

#### **2.4.1 Suhu**

Suhu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang (*latitude*), ketinggian dari permukaan air laut (*altitude*), waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, aliran dan kedalaman air (Effendi, 2003). Air buangan yang bersuhu tinggi biasanya berasal dari limbah pembangkit tenaga yang besar. Apabila dibuang langsung ke perairan umum dalam jumlah yang besar dan terus menerus akan membahayakan kehidupan organisme perairan.

#### **2.4.2 Kekeruhan air**

Kekeruhan mencirikan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (Effendi, 2003).

Kondisi air keruh yang diakibatkan padatan tersuspensi akan mempengaruhi kemampuan penetrasi sinar matahari, kekeruhan juga dapat menyebabkan air menjadi tidak produktif karena dapat menghambat penetrasi cahaya matahari (Riyadi *et al*, 2011).

#### **2.4.3 Salinitas**

Salinitas adalah jumlah (gram) zat-zat terlarut dalam satu kilogram air laut, dimana semua karbonat telah diubah menjadi oksida, brom dan iod diganti oleh klor dan semua bahan organik yang dioksidasi sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi salinitas di perairan, diantaranya penguapan, curah hujan, aliran sungai dan pola sirkulasi air. Suatu perairan dengan

penguapan yang tinggi memiliki salinitas yang lebih besar dibandingkan perairan yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi dan dipengaruhi oleh aliran sungai (Riyadi *et. al*, 2011).

#### **2.4.4 Dissolved Oxygen (Oksigen Terlarut)**

Oksigen terlarut sangat dibutuhkan oleh organisme akuatik dalam kehidupannya. Kehidupan organisme di air dapat bertahan jika terdapat oksigen terlarut minimum 5 mg oksigen setiap liter (5 bpj atau 5 ppm), selebihnya berantun pada daya tahan organisme, derajat keaktifannya, kehadiran pencemar dan suhu (Sastrawijaya, 1991).

Penurunan kadar oksigen terlarut dalam air merupakan indikasi kuat adanya pencemaran. Semakin tinggi pencemaran air, semakin berkurang kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga kadar oksigen terlarut dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas air (Sunu, 2011).

#### **2.4.5 Derajat Keasaman (pH)**

Derajat keasaman adalah ukuran untuk menentukan sifat perairan apakah asam atau basa. Perubahan pH di suatu perairan akan berpengaruh pada proses fisika, kimia maupun biologi dari kehidupan organisme akuatik. Air buangan yang mengandung pH yang tinggi atau rendah dapat mengakibatkan kematian mikroorganisme yang diperlukan (Sugiharto, 1987). Nilai pH lebih rendah pada pagi hari bila dibandingkan sore hari (Arifin *et al*, 2002).

#### **2.4.6 BOD**

Konsentrasi BOD di perairan mendeskripsikan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan organisme untuk mengoksidasi bahan-bahan organik. Beberapa faktor yang mempengaruhi BOD di perairan adalah suhu, densitas plankton, keberadaan mikroba dan jenis kandungan bahan organik (Effendi, 2002). Nilai BOD yang tinggi menunjukkan aktivitas mikroorganisme yang semakin tinggi dalam menguraikan bahan organik (APHA, 1989).

Derajat BOD dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kriteria yaitu kriteria tidak tercemar dengan kisaran BOD  $\leq 2,9$ ; kriteria tercemar ringan dengan kisaran BOD 3,0 – 5,0; kriteria tercemar sedang dengan kisaran BOD 5,1 – 14,9 dan kriteria tercemar berat dengan kisaran BOD  $\geq 15,0$ .

#### **2.4.7 Minyak, Sampah dan Bau**

Minyak memasuki lingkungan perairan melalui berbagai cara, seperti tumpahan dari kilang atau limbah effluent dari lingkungan terestrial dan sebagainya. Tumpahan minyak di laut memiliki efek terhadap komunitas plankton. Pertama, fisiologis langsung, dapat menyebabkan penurunan efisiensi fotosintesis karena adanya penambahan fraksi minyak di kolom air. Kemudian efek tidak langsung yang dapat menyebabkan perubahan dalam interaksi trofik dalam komunitas plankton mikroba (Gonzalez *et al*, 2009). Polusi minyak dapat mempengaruhi sumberdaya pesisir dan laut dengan berbagai cara. Misalnya, paparan minyak dan hidrokarbon lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan, makan, perkembangan dan reproduksi organisme perairan (Capuzzo, 1987).

Sampah laut merupakan limbah bahan padat sisa suatu proses atau produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, mayoritas sampah berupa sampah plastik, dan bersifat persisten di lingkungan perairan dalam jangka waktu yang panjang (Derraik, 2002). Keberadaan sampah dilaut yang mengapung dan menimbulkan bau akan menimbulkan gangguan estetika. Kualitas estetika yang sudah menurun akan mengganggu kenikmatan bagi wisatawan untuk berwisata.

### **2.5 DAYA DUKUNG KAWASAN PANTAI**

Menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Daya dukung merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan suatu sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari sesuai dengan ukuran kemampuannya. Dalam konteks pariwisata daya dukung menekankan pada jumlah maksimum orang yang dapat memanfaatkan suatu area/kawasan tanpa menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan fisik dan kualitas pengalaman dari berekreasi tetap terjaga (Mathieson *et.al.*, 1982). McNeely *et.al* (1992) mengemukakan daya dukung merupakan proses pemanfaatan suatu kawasan wisata dengan tingkat kepuasan yang optimal

dengan dampak yang dihasilkan minimal, dari definisi ini menempatkan aspek kualitas lingkungan menjadi kualitas wisata itu sendiri (Soemarwoto, 1997).

Pemanfaatan analisis daya dukung sangat tepat digunakan sebagai alat untuk pengelolaan pantai, karena memungkinkan pelestarian kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir. Pemanfaatan sumberdaya ini tidak saja diharapkan untuk pemenuhan pada masa kini, namun juga pemanfaatan ekonomi dan ekologi untuk generasi yang akan datang (UNEP/PAP, 1997:8)

Silva *et.al* (2007) mengemukakan analisis studi daya dukung pantai menggambarkan sebuah penghitungan terhadap kemanfaatan terhadap sebuah area oleh pengguna pantai dengan nilai  $x \text{ m}^2/\text{orang}$ , namun banyak faktor yang terlibat antara lain:

- Kondisi lingkungan seperti: aksesibilitas, luas area parkir, akomodasi, fasilitas wisata dan infrastruktur lainnya.
- Kondisi pantai seperti: akses pantai, kedalaman pantai, kebersihan pada saat pasang dan surut dan keamanan.
- Faktor eksternal seperti: kondisi iklim, musim, waktu, dan ekspektasi dari pengguna.

Konsep daya dukung ekowisata memperhatikan dua hal, yaitu 1) kemampuan alam untuk mentolerir gangguan atau tekanan dari manusia, dan 2) standar keaslian sumberdaya alam (Yulianda, 2007). Sementara Rajan (2013) mengemukakan pengelolaan lingkungan yang melibatkan komponen biofisik lingkungan untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan hanya berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam secara membabi buta, sehingga pengukuran daya dukung dianggap suatu alat analisis yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sementara itu kondisi daya dukung dapat ditingkatkan dengan penambahan atraksi dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan zonasi yang telah dibuat. Menurut WTO (1992), standar daya dukung kegiatan wisata berdasarkan jumlah pengunjung per hektar disajikan pada tabel 2-1 berikut ini.

Tabel 2-1. Daya dukung objek wisata terhadap jumlah pengunjung per hektar

| No | Kegiatan Wisata             | Jumlah Wisatawan (Per Hektar) |
|----|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Hutan Wisata                | 15                            |
| 2. | Taman wisata alam pinggiran | 15-70                         |
| 3. | Piknik kerapatan tinggi     | 300-600                       |
| 4. | Piknik kerapatan rendah     | 60-200                        |
| 5. | Golf                        | 10-15                         |
| 6. | Memancing                   | 5-30                          |
| 7. | Ski air                     | 5-15                          |
| 8. | Jalan-jalan (hiking)        | 40                            |

Sumber : WTO (1992)

## 2.6 PARTISIPASI MASYARAKAT

### 2.6.1 Definisi

Partisipasi berarti melibatkan diri atau dibolehkan terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan atau menghasilkan suatu penghargaan atau evaluasi penghargaan, atau menjadi salah satu anggota dari sejumlah orang untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu hal (Brownlea, 1987). Sementara menurut Arnstein (1969) Partisipasi merupakan sebuah proses yang memungkinkan masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses politik dan ekonomi menjadi kumpulan yang dilibatkan pada masa yang akan datang.

Menurut Zuhud (1998), partisipasi merupakan suatu cara untuk melakukan interaksi antara kelompok-kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dengan kelompok yang selama ini mengambil keputusan (*elite*). Dalam kasus upaya pengelolaan kawasan pantai, yang menjadi *elite* adalah pengelola kawasan wisata pantai, sedangkan kelompok *non-elite* bisa terdiri atas masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan wisata.

Menurut Mubyarto (1984), partisipasi adalah kesediaan untuk berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hadi (1995) menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategi, komunikasi, media pemecahan publik dan terapi sosial.

Partisipasi menuntut adanya keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dapat secara langsung dan tidak langsung. Keterlibatan secara langsung, misalnya secara langsung ikut melaksanakan kegiatan (fisik terlibat); sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dalam suatu kegiatan tetapi memberikan bantuan material atau sumbangan pikiran dalam kegiatan tersebut (Akhyar, 1994).

Makna lain mengenai partisipasi yang bersifat umum ialah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Proses keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik terkadang memakan waktu yang lama dan terkadang melelahkan. Namun pendapat lain dikemukakan oleh Freudenburg (1983) dalam Hadi (2009) harus pula disadari bahwa keseluruhan waktu yang diperlukan untuk implementasi akan bisa diperpendek jika partisipasi publik berhasil menghimpun input (masukan) yang relevan untuk perencanaan. Lemahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kekurangan kapasitas keberdayaan dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas baik pengetahuan maupun sikap (Budiyati, 2012).

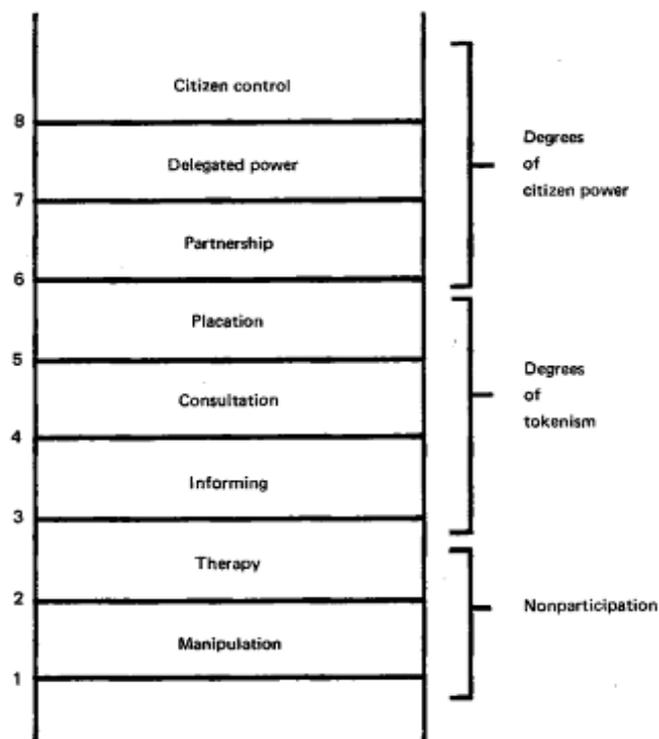
### **2.6.2 Tingkatan Partisipasi**

Menurut Arnstein (1969) menggambarkan ada 8 (delapan) tipologi tingkatan partisipasi (*Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation*) yaitu:

- a. Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai "*nonparticipation*" dengan menempatkan bentuk peran serta yang dinamakan (1) *manipulation* dan (2) *therapy*. Sasaran dari kedua tangga ini adalah masyarakat yang terlibat untuk berperanserta.
- b. Tangga ke-3, ke-4 dan ke-5 dikategorikan sebagai tingkat "*Tokenism*" atau partisipasi pasif, yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan, bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Menurut Arnstein jika peran serta masyarakat dibatasi pada tingkat ini, maka kecil kemungkinan akan terjadinya perubahan

dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. *Informing*, *Consultation* dan *Placation* termasuk dalam tingkatan ini.

- c. Tiga tangga teratas termasuk dalam “*Degree of Citizen Power*” atau tingkat kekuasaan masyarakat, artinya masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan melaksanakan kemitraan (*Partnership*), memiliki posisi tawar bersama dengan pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi, masyarakat mampu mendelegasikan kekuasaan (*Delegated Power*) dan pengawasan masyarakat (*Citizen Control*).



Gambar 2-4. Tingkatan Partisipasi menurut Arnstein (1969)

### 2.6.3 Bentuk dan Tipe Partisipasi

Pemerintah atau pemegang kekuasaan harus dapat menyesuaikan program-program pembangunan dengan kebutuhan (bukan keinginan) yang dirasakan masyarakat di wilayah bersangkutan. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat disaring melalui musyawarah atau pertemuan yang melibatkan masyarakat setempat. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Cohen dan Uphoff's (1980) terdapat beberapa dimensi partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan;
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Sementara tipe partisipasi masyarakat oleh Dusseldorp (1993) dalam Suciati (2006), terdapat dua tipe partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yakni:

a. Partisipasi bebas

Partisipasi bebas terjadi bila individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua tipologi, yaitu partisipasi bebas spontan dan partisipasi bebas terbujuk. Partisipasi bebas spontan terjadi bila seseorang individu berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi akan oleh lembaga atau orang lain. Sedangkan partisipasi bebas terbujuk adalah bentuk partisipasi seseorang yang diyakinkan melalui penyuluhan atau pengaruh orang lain sehingga berpartisipasi secara sukarela.

b. Partisipasi terpaksa

Partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum. Berpartisipasi dalam kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda. Partisipasi terpaksa karena kondisi ekonomi terjadi bila seorang yang tidak turut di dalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya. Jadi secara garis besar untuk mencapai tujuan yang melibatkan partisipasi masyarakat mencakup pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan (*action*) dari masyarakat itu sendiri.

#### **2.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Slamet (1994) dalam Suciati (2006) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan..

##### **a. Jenis Kelamin**

Partisipasi yang diberikan oleh pria dan wanita dalam pengelolaan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Soedarno (1992) dalam Suciati (2006) mengatakan bahwa perbedaan kedudukan dan derajat ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini mengindikasikan bahwa golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi.

##### **b. Usia**

Slamet (1994) dalam Suciati (2006) menjelaskan bahwa usia berpengaruh terhadap keaktifan seseorang untuk berperan serta. Faktor usia memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Seorang yang memasuki usia produktif dianggap mampu bekerja dan terlibat aktif dalam kegiatan, dan seseorang yang lebih tua akan terlibat sebagai penasehat atau panutan bagi anggota kelompok yang lebih muda.

##### **c. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan penduduk memahami keberlanjutan usaha pengelolaan kawasan wisata, dan menjelaskan bahwa penduduk yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dapat terlibat dalam kegiatan perencanaan, sementara penduduk dengan tingkat pendidikan rendah dapat berperan dalam tahanan pelaksanaan dan pemanfaatan. Asumsi bahwa dengan pendidikan yang semakin tinggi, seseorang akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, lebih cepat tanggap dan lebih inovatif.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Baross dalam Bowo (2006) menyatakan bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan akan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan pekerjaan fisik. Sementara penduduk miskin kebanyakan melakukan pekerjaan fisik atau berpartisipasi dalam hal tenaga, tidak berkontribusi uang.

### 2.6.5 Keuntungan dan Hambatan Partisipasi Masyarakat

Ndraha (1982) menjelaskan bahwa keuntungan dan masalah partisipasi akan dilihat dalam konteks yang berbeda oleh setiap orang yang berkepentingan. Keuntungan dari partisipasi antara lain:

- a. Masyarakat akan merasa memiliki terhadap rencana kerja;
- b. Memungkinkan adanya ide-ide kreatif dan segar;
- c. Mendapatkan bantuan dalam bentuk barang atau sumberdaya lain;
- d. Masyarakat akan tetap merasa menjadi bagian pemecahan masalah jangka panjang karena merasa telah memiliki rencana dan ide-ide awal;
- e. Membangun kepercayaan diri, kesadaran dan keyakinan masyarakat menjadi bagian penting dalam proyek dan kesempatan-kesempatan lainnya;
- f. Kebersamaan dalam mendiskusikan isu-isu dan mengembangkan ide-ide, metode yang tepat guna untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan keuntungan-keuntungan di atas, maka partisipasi merupakan hal yang penting secara kualitas sebagai *input* atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memperoleh keputusan yang sah, sebagai bentuk komunikasi dan tanggung jawab pemerintah (pemegang kekuasaan) untuk menampung pendapat dan aspirasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat memiliki hambatan-hambatan dalam penerapannya. Soelaiman (1985) dalam Bowo (2006) menyebutkan beberapa hambatan dalam partisipasi yang apabila didayagunakan dengan benar dapat

menjadi faktor pendukung keberhasilan partisipasi, antara lain sikap sosial yang membudaya seperti patrenalistik, feodal, dominasi, struktur pranata sosial yang berlapis-lapis, waktu luang, tidak adanya forum atau kelompok, profesionalitas, kemiskinan, mobilisasi penduduk yang cukup tinggi seperti di perkotaan serta program-program yang tidak berorientasi pada kebutuhan lokal.

## **2.7 STRATEGI PENGELOLAAN WISATA PANTAI**

### **2.7.1 Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekowisata di daerah Pantai**

Perencanaan dan pengembangan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan mengingat tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan ekowisata dan rawannya kondisi ekologis pantai. Perencanaan pengembangan ekowisata ditentukan oleh keseimbangan potensi sumberdaya alam dan jasa yang dimiliki serta minat ekowisatawan. Situmorang (2001) menyatakan bahwa perencanaan kawasan ekowisata yang berwawasan lingkungan merupakan suatu perencanaan jangka panjang, karena tujuan dari perencanaan ini adalah untuk melestarikan lingkungan dan melindunginya. Hal – hal yang perlu dilakukan antara lain

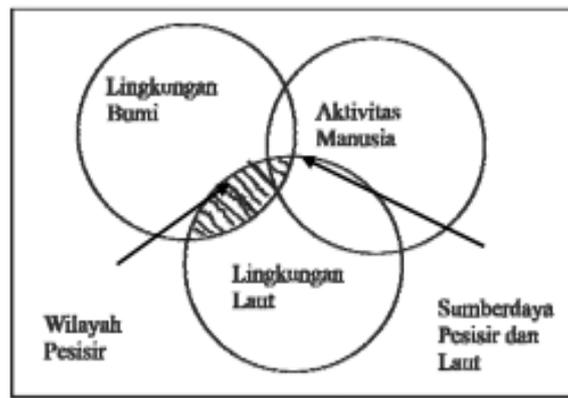
- a. Identifikasi sumberdaya dan area yang bisa dikembangkan sebagai kawasan ekowisata.
- b. Merencanakan kawasan ini dengan meminimumkan dampaknya terhadap lingkungan maupun penduduk sekitar.
- c. Mengundang wisatawan yang sesuai (jumlah maupun karakteristiknya) dengan daya dukung alam yang ada.

Masalah – masalah spesifik yang berhubungan dengan perusakan lingkungan pantai perlu ditinjau untuk meminimumkan dampak ekowisata terhadap lingkungan. Perlu melibatkan masyarakat setempat karena mereka yang akan mengalami dampak dari kegiatan ekowisata ini secara langsung. Apabila lingkungan mengalami kerusakan mereka yang akan menerima dampaknya. Keikutsertaan masyarakat setempat sangat besar manfaatnya karena mereka merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitar, dan mereka mempunyai cara tersendiri melestarikan alam. Keuntungan

yang dapat diperoleh dari kegiatan ekowisata ini harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai (Situmorang, 2001).

### 2.7.2 Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu

Wilayah pesisir dan laut merupakan tatanan ekosistem yang memiliki hubungan sangat erat dengan daerah lahan atas (*upland*) baik melalui aliran air sungai, air permukaan (*run off*) maupun air tanah (*ground water*), dan dengan aktivitas manusia. Keterkaitan tersebut menyebabkan terbentuknya kompleksitas dan kerentanan di wilayah pesisir. Secara konseptual, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam keterkaitan antara lingkungan darat (bumi), lingkungan laut, dan aktivitas manusia. Hubungan antara wilayah pesisir dan sistem sumberdaya pesisir disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2-5 Hubungan antara Wilayah Pesisir dan Sistem Sumber daya Pesisir (Scura *et al.*,1992)

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Keterpaduan yang dimaksud mengandung tiga dimensi yaitu sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis (Dahuri *et al.*, 2004). Keterpaduan sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*) dan antar tingkat pemerintah mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat

(*vertical horizon*). Apabila ditinjau dari sudut pandang keilmuan, keterpaduan yang dimaksud mencakup pendekatan interdisiplin ilmu terkait seperti ekonomi, ekologi, sosiologi, hukum dan ilmu lainnya yang relevan (Dahuri *et al.*, 2004). Beberapa tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menurut Dahuri (2003a) adalah sebagai berikut:

1. Mencapai pembangunan daerah pesisir dan lautan yang berkelanjutan.
2. Mengurangi gangguan alam yang membahayakan daerah pesisir dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya.
3. Mempertahankan proses ekologi, sistem pendukung kehidupan, dan keragaman hayati di daerah pesisir dan lautan.

Sebagai suatu kesatuan ekologis, wilayah pesisir tersusun atas berbagai ekosistem mulai dari mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang saling terkait satu sama lain. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan berdampak pula pada ekosistem yang lain. Oleh karena itu dalam melakukan pengelolaan terhadap kawasan pesisir harus memperhatikan keterkaitan ekologis dan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan. Dahuri *et al.* (2004) menjelaskan bahwa secara ekologis terdapat tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) keharmonisan spasial (*spatial suitability*), (2) kapasitas asimilasi (*assimilative capacity*) dan (3) pemanfaatan berkelanjutan. Prinsipnya adalah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dapat mengakomodasikan adanya spektrum zonasi di wilayah pesisir dan lautan yaitu (1) daerah pedalaman (*inland areas*); (2) daratan pantai (*coastal lands*); (3) perairan pantai (*coastal waters*); (4) perairan lepas pantai (*offshore waters*) dan laut bebas (*high sea*); dimana masing – masing zona tersebut memiliki kepemilikan, ketertarikan pemerintah serta institusi yang berbeda.

Keberlanjutan merupakan suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang tanpa harus mengorbankan peluang generasi sekarang untuk tumbuh dan berkembang serta meletakkan dasar – dasar pengembangan bagi generasi – generasi mendatang (WCED, 1987 *dalam* Patria, 1999).

Keberlanjutan dari kegiatan wisata pesisir dan laut tidak terlepas dari aspek daya dukung kawasan secara ekologis dan sosial ekonomi mampu menopang kegiatan tersebut. Savariades (2000) dalam Adrianto (2006) menyatakan bahwa daya dukung dalam kegiatan pariwisata itu merupakan kemampuan daerah tujuan wisata menerima kunjungan sebelum dampak negatif timbul dan sebuah level dimana arus wisatawan mengalami penurunan akibat keterbatasan kapasitas yang muncul dari dalam tingkah laku wisatawan itu sendiri. Sementara itu, Davis and Tisdell (1996) dalam Adrianto (2006) mendefinisikan bahwa daya dukung di dalam kegiatan wisata adalah maksimum jumlah turis yang dapat ditoleransi tanpa menimbulkan dampak tidak dapat pulih dari ekosistem/lingkungan dan pada saat yang sama tidak mengurangi kepuasan kunjungan. Daya dukung kawasan pesisir didefinisikan sebagai populasi maksimum dari suatu spesies yang dapat mendukung keberlanjutan, untuk jangka waktu yang lama dan terdapat perubahan tanpa disertai degradasi sumberdaya alam yang dapat mengurangi kemampuan populasi maksimum di masa yang akan datang (Kirchner *et al.*, 1985; Munn, 1989 dalam Dahuri, 1998). Dasar dalam definisi daya dukung ekosistem ditentukan oleh kemampuan ekosistem untuk menyediakan sumberdaya alam dan jasa lingkungan sebagai contohnya: ruang untuk hidup, daerah rekreasi, udara yang bersih, dan kemampuan ekosistem untuk mengatur buangan limbah (Dahuri, 1998).

Konsep konsep daya dukung dalam konteks rekreasi terpusat pada dua hal yaitu: (1) *biophysical components*; dan (2) *behavioral components* (Savariades, 2000 dalam Adrianto, 2006). Daya dukung adalah suatu ukuran jumlah individu dari suatu spesies yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu (Manik, 2003). Daya dukung suatu wilayah sangat ditentukan oleh potensi sumberdaya (alam, buatan dan manusia), teknologi untuk mengelola sumberdaya (alam dan buatan), serta jenis pekerjaan dan pendapatan penduduk. Ketersediaan sumberdaya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan manusia akan meningkatkan daya dukung lingkungan.

### 2.7.3 Penentuan Strategi Pengelolaan Kawasan Wisata

Pengelolaan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan dan mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya (Tuwo, 2011). Selanjutnya, Clark (1992), menyatakan dalam pendekatan pengelolaan diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan kajian yang sistematis terhadap sumberdaya alam yang meliputi potensi, alternatif pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi untuk memilih dan menentukan cara pemanfaatan yang terbaik dan tepat.

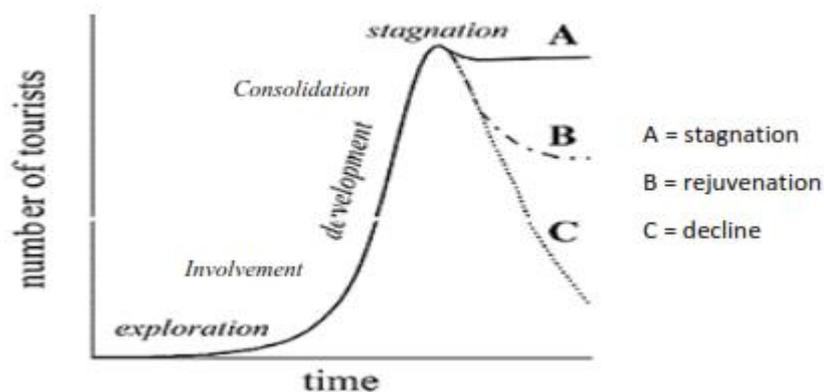
Suatu wilayah bila akan dikembangkan menjadi suatu kawasan pariwisata membutuhkan strategi perencanaan yang baik, komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat mencapai sasaran sebagaimana yang dikehendaki dan dapat meminimalkan munculnya dampak-dampak yang negatif, baik menurut sudut pandang ekologis, ekonomis maupaun sosial budaya dan hukum. Menurut Gunn (1994), perencanaan pengembangan pariwisata ditentukan oleh keseimbangan potensi sumberdaya dan jasa yang dimiliki dan permintaan atau minat pengunjung wisata. Komponen penawaran terdiri dari atraksi (potensi keindahan alam dan budaya serta bentuk aktivitas wisata), transportasi (aksesibilitas), dan amenitas berupa pelayanan informasi dan akomodasi dan sebagainya. Sedangkan komponen permintaan terdiri dari pasar wisata dan motivasi pengunjung. Proses pengembangan sebuah destinasi wisata dapat dilihat pada skema model yang dikembangkan oleh Butler (1980) tentang siklus hidup sebuah destinasi wisata.

Menurut Butler (1980), sebuah destinasi wisata akan mengalami siklus/tahapan pengembangan berdasarkan jumlah kunjungan disandingkan dengan lamanya keberadaan destinasi wisata itu berkembang, masing-masing siklus/tahapan itu antara lain:

- Tahap *Exploration*, kunjungan masih bersifat sporadis dan terjadi pertama kali kontak dengan masyarakat lokal beserta fasilitas yang mereka miliki.
- Tahap *Involvement*, Keterlibatan masyarakat mulai dirasakan dengan ditandai penawaran fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal kepada

pengunjung, sehingga ada proses adaptasi sosial masyarakat terhadap keberadaan pengunjung, pada tahap ini mulai ditandai dengan upaya promosi destinasi wisata.

- Tahap *Development*, ditandai dengan masuknya investor dari luar untuk penanaman modal guna penyediaan fasilitas pariwisata, infrastruktur dan sarana penunjang mengalami peningkatan, serta munculnya produk wisata buatan yang disediakan khusus untuk pengunjung, pertumbuhan pariwisata begitu cepat ditandai dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang banyak dan fasilitas import.
- Tahap *Consolidation*, ekonomi lokal memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberadaan industri pariwisata, terjadi penurunan rata-rata kenaikan level kunjungan wisatawan. Pengembangan terus berlanjut ditandai dengan pemasaran yang semakin luas guna menjangkau pasar yang jauh.
- Tahap *Stagnation*, Kapasitas maksimum dari ketersediaan fasilitas penunjang telah terlampaui, sehingga muncul permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan, destinasi sudah dianggap tidak menarik lagi.
- Tahap *Decline*, wisatawan tertarik terhadap destinasi yang baru, dan terjadi disfungsi fasilitas pariwisata.
- Tahap *Rejuvenation*, terjadi penciptaan atraksi wisata buatan baru atau penggunaan sumberdaya alam yang belum tereksplorasi sebelumnya.



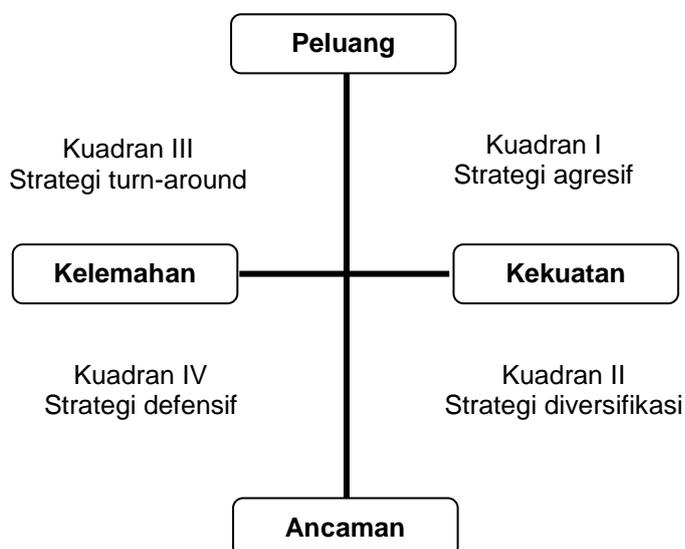
Gambar 2-6. Siklus Hidup Destinasi Wisata  
Sumber : Butler, 1980

Strategi merupakan tanggapan yang secara terus menerus yang adaptif terhadap peluang dan ancaman yang berasal dari faktor luar serta kekuatan dan kelemahan dari faktor dalam yang mempengaruhi organisasi (Rangkuti, 2000).

Strategi kebijakan pengelolaan kawasan wisata Pantai Tanjung Kerasak dipengaruhi oleh para pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*). *Stakeholders* adalah kelompok yang berada baik di dalam maupun di luar organisasi yang berperan terhadap penentuan kinerja suatu organisasi (Sutomo *et al.*, 2002).

#### 2.7.4 Analisis SWOT

SWOT berasal dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats*. Analisis SWOT melakukan perbandingan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) (Rangkuti, 2000). Tujuan analisis SWOT adalah untuk memperoleh keputusan melalui analisa yang membandingkan antara optimasi kekuatan dan peluang dengan meminimasi kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2000).



Gambar 2-7. Diagram Analisis SWOT (Rangkuti, 2000)

- Kuadran I : merupakan situasi yang menguntungkan. Pada situasi ini terdapat kekuatan dan peluang yang bisa dimanfaatkan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*)
- Kuadran II : meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun pada kondisi ini masih terdapat kekuatan dari segi internal. Strategi yang

harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar)

Kuadran III : Kondisi ini terdapat peluang yang sangat besar, tetapi lain pihak terdapat kelemahan internal. Sehingga strategi yang dijalankan adalah meminimasi masalah-masalah internal sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan baik.

Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, kondisi ini terdapat berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah matriks SWOT yang terdapat pada gambar 2-7. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi mampu disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan strategis (Rangkuti, 2000).

Tabel 2-2. Matriks SWOT

| EKSTERNAL \ INTERNAL                    | INTERNAL                                      | STRENGTHS (S)<br>Faktor kekuatan internal                               | WEAKNESS (W)<br>Faktor kelemahan internal                                     |
|---|---|---|---|
|   | OPPORTUNITIES (O)<br>Faktor peluang eksternal |   | STRATEGI S-O<br>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang |
| THREATS (S)<br>Faktor ancaman eksternal |   | STRATEGI S-T<br>Strategi menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman | STRATEGI W-T<br>Strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman     |

Sumber : Rangkuti (2000)

Kelebihan dari penggunaan metode analisis SWOT adalah dapat mengembangkan dan mengadopsi strategi yang disesuaikan dengan kecocokan faktor internal dan eksternal. SWOT juga dapat digunakan ketika alternatif strategi muncul dan keputusan yang relevan dengan alternatif tersebut harus dianalisis (Kangas et al. 2001). Di sisi lain analisis SWOT juga memiliki beberapa kelemahan, dalam penerapan analisis SWOT, kemungkinan penilaian secara komprehensif dalam pengambilan keputusan memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain itu pernyataan atau ekspresi dari faktor-faktor individu seringkali bersifat global dan ringkas (Hill and Westbrook, 1997).

### **2.7.5 Analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*)**

Analytical Hierarchy Process (AHP) atau dikenal dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) adalah suatu model yang luwes yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Proses ini memberi suatu kerangka bagi partisipasi kelompok dalam pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan (Saaty, 1993).

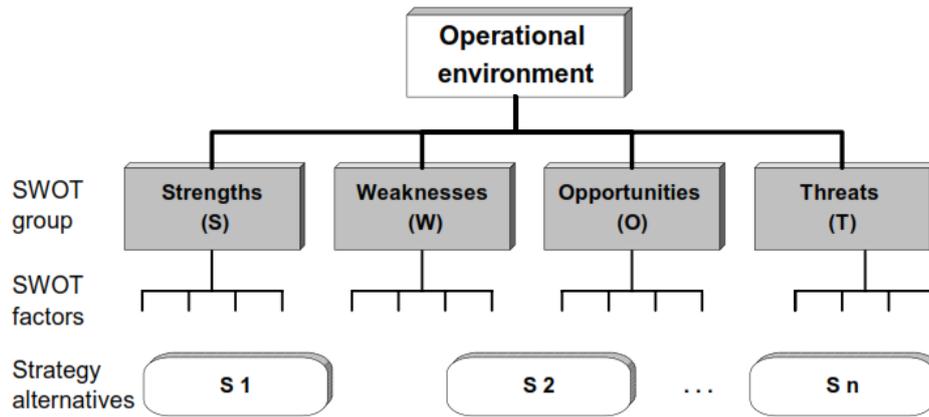
Pengambilan keputusan berdasarkan AHP menggunakan bilangan untuk menggambarkan suatu relatif pentingnya suatu elemen diatas yang lainnya. Nilai itu memuat skala perbandingan antara 1 sampai 9. Menurut (Saaty, 1993), hierarki adalah suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub-kriteria, hingga level terakhir sebagai alternatif.

Kelemahan-kelemahan dari metode AHP yaitu karena metode AHP sangat tergantung input utamanya . Dalam hal ini input utamanya berasal dari persepsi dari pakar/ahli sehingga aspek subjektivitasnya tetap muncul. Selanjutnya apabila dikaji lebih mendalam salah satu kelemahan AHP yaitu jika melakukan perbaikan keputusan harus dimulai dari tahap awal (Tantyonimpuno & Retnaningtias, 2006).

### **2.7.6 Analisis AHP dan SWOT (A'WOT)**

Metode A'WOT (Kangas *et.al*, 2001) merupakan bentuk gabungan antara AHP dan SWOT dengan tujuan mengevaluasi secara sistematis faktor-faktor SWOT dan membuatnya lebih sepadan sesuai dengan intensitasnya. Nilai dari analisis SWOT didapat dengan cara perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*) antara faktor-faktor SWOT, kemudian menganalisis faktor tersebut dengan teknik *eigen value* aplikasi AHP.

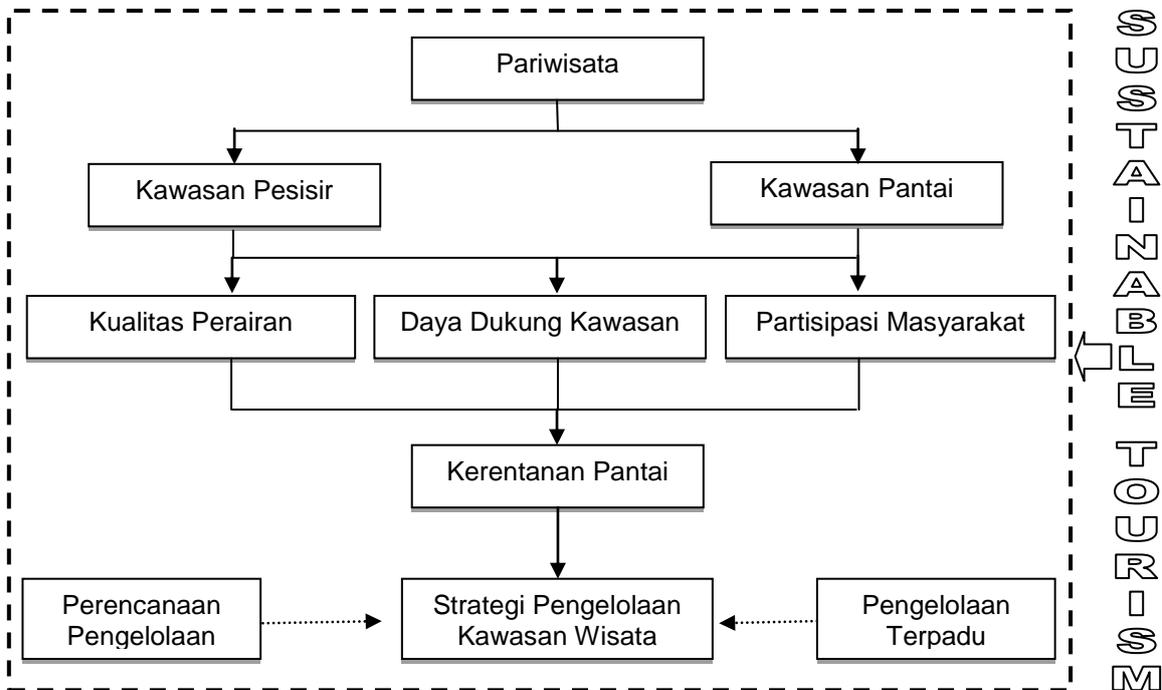
Penentuan hirarki dalam perumusan strategi dengan menggunakan metode AHP dan SWOT ditampilkan pada gambar 2-8. berikut.



Gambar 2-8. Hirarki dalam Analisis A'WOT (Kangas, et.al., 2001)

## 2.8 KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP PENELITIAN

### 2.8.1 Kerangka Teori Penelitian



Gambar 2-9. Kerangka Teori Penelitian

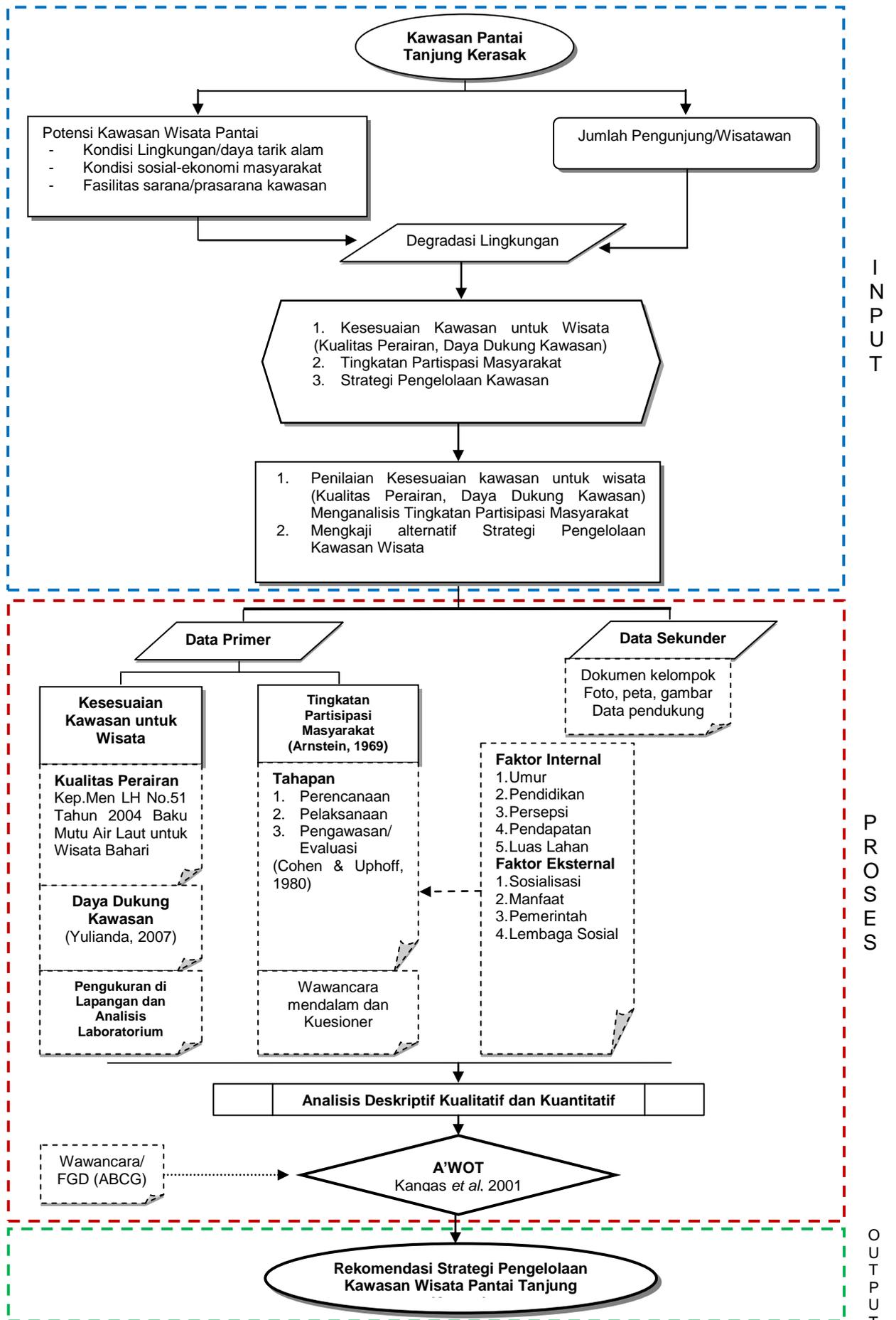
### 2.8.2 Kerangka Konsep Penelitian

Dalam beberapa dekade terakhir pengembangan kawasan wisata pantai untuk wisata terus meningkat. WTO (2004) menyatakan bahwa hampir tiga perempat destinasi wisata di dunia adalah daerah pesisir pantai. Hal ini mengindikasikan adanya peluang dalam pengembangan kawasan wisata pantai agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan di daerah.

Pantai Tanjung Kerasak merupakan obyek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, dengan daya tarik wisata berupa hampiran pasir putih dan air yang jernih memberikan kenyamanan wisata bagi para wisatawan, ditambah dengan berbagai fasilitas permainan sebagai sarana prasarana penunjang kawasan.

Kegiatan wisata selain memberikan kontribusi dalam hal pendapatan daerah, namun disisi lain kondisi lingkungan akan ikut terdegradasi, dimana kawasan perairan pantai menjadi salah satu bagian yang paling rentan terhadap perubahan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang dapat menjamin keberlangsungan wisata di Pantai Tanjung Kerasak. Selain mampu menjadi pemasukan pendapatan bagi daerah, keberadaan kawasan wisata juga harus dapat diterima oleh masyarakat agar tidak bertentangan dengan adat istiadat yang ada, oleh karena itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan agar keberlanjutan kawasan tersebut dapat terus terjaga.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kesesuaian kawasan untuk kegiatan wisata dengan mengkaji kondisi lingkungan perairan, daya dukung kawasan dan daya dukung ekologis untuk kegiatan wisata pantai. Selain itu juga penelitian ini juga mencoba menganalisis tingkatan partisipasi masyarakat setempat dalam upaya pengelolaan kawasan wisata dengan melihat keterlibatan masyarakat dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Untuk merumuskan alternatif strategi pengelolaan menggunakan analisis A'WOT (SWOT dan AHP) dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya kerangka konsep penelitian disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2-10. Kerangka Konsep Penelitian